

## ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (UUP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), pencabutan izin usaha bank merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh Bank Indonesia, karena pencabutan izin usaha bank dampak menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank Indonesia berwenang menggunakan *Exit Policy* berupa pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan pelaksanaan likuidasi. *Exit Policy* yaitu mengeluarkan suatu bank yang sedang dalam kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat diselamatkan lagi, yang harus dikeluarkan dari sistem perbankan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah *juridis normatif*, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kasus yang dibahas. Dengan tetap berlandaskan pada data sekunder dan didukung data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak penulis bahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Perundang-Undangan "*Statute Approach*" yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

Pertama, sistem perlindungan nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank telah diatur dalam Pasal 37B ayat (1) UUP bahwa perlindungan nasabah penyimpan dana diutamakan, dan menurut ketentuan Pasal 29 ayat (4) UUP, bahwa untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU LPS menetapkan fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dan kewenangannya,

sedangkan tugas LPS adalah merumuskan menetapkan dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f UU LPS bahwa dalam penempatan simpanan nasabah yang tidak dijamin dan/atau simpanan nasabah yang tidak dibayarkan dalam penjaminan, yang mana dalam hal ini seharusnya diletakkan pada huruf d dikarenakan pada ketentuan huruf f ini bertentangan dengan spirit Undang-Undang Perbankan yang mana di dalam Pasal 37B ayat (1) dan Pasal 29 ayat (4)UUP

Kedua, Bentuk pertanggungjawaban pemegang saham pada bank terlikuidasi diatur dalam Pasal 54 ayat (5) UU LPS, apabila seluruh aset telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain yakni pada Pasal 54 ayat (1) huruf f UU LPS bahwa bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU PT, Pemegang saham diminta pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan asas *the corporate veil*. Penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh BDL dikarenakan sebagian besar kredit yang dikeluarkan oleh direksi bank atas perintah pemegang saham pengendali yang melanggar ketentuan BMPK sehingga bank mengalami kesulitan keuangan dan mengalami likuidasi. Maka nasabah penyimpan dana atau ahli warisnya dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

*Kata kunci : nasabah, likuidasi, pemegang saham*

## ABSTRACT

Under the laws of the republic Indonesia number 10 year 1998 on the amendment of law number 7 year 1992 on banking. As specified in article 37 paragraph (1) and paragraph (2), the bank revocation is a last resort taken by Indonesian banks, since the revocation of business licenses of banks and adversely affected public confidence in the banking institutions. Bank Indonesia is authorized to use the *Exit Policy* in the form of revocation, the dissolution of the legal entity and the implementation of liquidation. *Exit Policy* is issued a bank that is in trouble and endangering its survival can not be saved anymore, that should be excluded from the banking system.

This type of research is normative, meaning research by applying the laws and regulations related to the cases discussed. Will still based on secondary data and *primary data backed relating to issues to be discussed the authors*. The approach used in the study of law is a statutory approach "*Statue Approach*" that approach by using legislation and regulation.

That results showed that :

First, depositors protection system in the liquidation of the bank has been set in paragraph (1) of article 37B banking law that the protection of depositors priority, and according to the provisions of article 29, paragraph 4 banking law, that in the interests of bank customers are required to provide information about the potential risk of loss with respect to transactions conducted through the bank's customers. Under article 4 and article 5 of the law establishes the function of the deposit insurance agency deposit insurance agency is guaranteeing depositors savings and actively participates in maintaining the stability of the banking system in accordance with its authority, while the deposit insurance agency task is to formulate and

establish and implement policies for the implementation of deposit insurance. In article 54 paragraph (1) letter f legislation deposit insurance agency that placement of customer deposits are not guaranteed or customer deposit are not paid in underwriting, which in this case should but put in the letter d' due to the provisions of letter if is contrary to spirit banking legislation which in article 37B paragraph (1) and article 37B paragraph (1) and article 29, paragraph (4) banking law.

Second, a form of liquidated banks shareholders stipulated in article 54, paragraph (5) legislation deposit insurance agency, when all the assets have been depleted in the process of liquidation and there is still a bank's liabilities to other parties in article 54 paragraph (1) letter f legislation deposit insurance agency that part of the savings depositors are not paid bail and deposits of depositors are not guaranteed, then is obligation shall be paid by the existing shareholders are proven to cause that bank to be a bank fails. Under article 3, paragraph (2) limited liability company law, shareholders of privately held accountable based on the principle of *the corporate veil*. The cause financial hardship faced by banks in liquidation because most credit issued by the bank directors at the bahest of the controlling shareholders in violation of the legal lending limit. Than the depositors or their heirs may file an objection to the deposit insurance agency backed real avoidance and clear, or take legal actions through the courts.

*Keywords : Customer, Liquidation, Shareholders.*